

Mengukur Kualitas Jurnalistik Pewarta Muda Lulusan Uji Kompetensi Wartawan di Jakarta

<https://doi.org/10.25008/wartaiski.v3i02.63>

Deddy Irwandy^{1*}, Rizka Septiana², Artini³

^{1,2,3}Fakultas Komunikasi, Institut Komunikasi & Bisnis LSPR

Jl K.H. Mas Mansyur Kav 35, Jakarta Pusat 12310, Indonesia

*e-mail korespondensi : deddy.i@lspr.edu

Submitted: 18/09/2020, Revised: 02/12/2020, Accepted: 18/12/2020

Accredited by Kemristekdikti No. 30/E/KPT/2019

Abstract

The quality of journalism in the Special Capital Province of Jakarta (DKI Jakarta) can be seen from its 2020 Press Freedom Index (IKP) score of 72.63, which is categorized as “good“. Yet DKI Jakarta is ranked third from bottom amongst 34 provinces in Indonesia. This means that the quality of DKI Jakarta's press is categorized as “bad“. The score falls as compared to that of 74.37 in 2019. Although the score is “good“, the journalistic quality can be categorized as “bad“ since it is still far from 100. In 2019, the Press Council received 600 complaints from the public mostly about violation of the journalistic code of ethics, including not seeking confirmation of news, receiving bribes, cloning news and plagiarism. The objective of this research is to assess the journalistic quality of junior journalists participating in the competency test in Jakarta. Thus, the informants assessing the journalistic quality are those having experience related to young journalists, including editors, source persons and public relations officers. The methodology of this research is mixed method in which the researcher conducted surveys to 100 respondents in Jakarta and an in-depth interview with the Chairman of the Indonesian Journalists Alliance (AJI) for the 2017-2021 term, Abdul Manan, and Head of the Press Council for the 2013-2019 term, Yosep Adi Prasetyo. This research is expected to contribute to developing the quality of journalist competency test and encourage journalists to improve their journalistic quality

Keywords: Journalism quality; professionalism; journalist competency test; press freedom index; journalist code of ethics

Abstrak

Kualitas jurnalistik DKI Jakarta dapat dilihat pada skor Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) provinsi DKI Jakarta tahun 2020 yakni 72.63, masih masuk kategori baik, namun posisinya pada urutan ketiga dari bawah di antara 34 provinsi. Ini artinya kualitas pers DKI Jakarta dapat dikatakan buruk. Skor tersebut turun dibanding IKP DKI Jakarta tahun 2019 yakni 74.37. Meski skor menunjukkan baik, namun kualitas jurnalistik dapat dimaknai masih buruk karena masih sangat jauh menuju angka 100. Tahun 2019 tercatat 600 pengaduan masyarakat ke Dewan Pers, yang sebagian besar karena pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, antara lain karena tidak melakukan konfirmasi, masih menerima suap, kloning berita dan plagiat. Tujuan penelitian ini untuk mengukur kualitas jurnalistik wartawan lulusan uji kompetensi wartawan (UKW) tingkat muda di Jakarta dengan informan yang memberikan penilaian adalah masyarakat yang mempunyai pengalaman berhubungan dengan para wartawan muda yakni para redaktur, narasumber dan Humas. Metodologi yang digunakan adalah *mixmethod* yakni survei 100 responden di Jakarta dan *indepth interview* dengan Ketua Umum AJI 2017-2021 Abdul Manan dan Ketua Umum Dewan Pers periode 2013-2019 Yosep Adi Prasetyo. Implikasi hasil penelitian ini dapat menjadi pengembangan mutu UKW dan mendorong wartawan terus meningkatkan kualitas jurnalistik.

Kata kunci: kualitas jurnalistik; profesionalisme; uji kompetensi wartawan; indeks kemerdekaan pers; kode etik jurnalistik

PENDAHULUAN

Sampai sekarang belum pernah dilakukan evaluasi terhadap kualitas jurnalistik para wartawan (wartawan) pemegang sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Muda, terutama di Jakarta sebagai barometer media. Kewajiban wartawan memiliki sertifikat UKW merupakan amanat yang ditandatangani sejumlah tokoh pers pada 9 Februari 2010 saat perayaan Hari Pers Nasional (HPN) di Palembang.

Sampai tahun 2019, sekitar 15 ribu wartawan Indonesia sudah lulus UKW di jenjang kompetensi muda, madya dan utama melalui pelaksanaan UKW oleh 27 lembaga UKW mulai dari perguruan tinggi komunikasi, perusahaan pers, organisasi wartawan, dan lembaga pendidikan pers. Wartawan dinyatakan lulus dan disebut “kompeten” bila mendapat nilai 70 ke atas, sementara wartawan dengan nilai di bawah 70 disebut “belum kompeten”.

Permasalahannya adalah meski sudah ribuan wartawan mengantongi sertifikat UKW, namun faktanya masih banyak pengaduan masyarakat ke Dewan Pers. Tahun 2019 tercatat 600 pengaduan yang sebagian besar karena pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, antara lain menyiarkan berita tanpa melakukan konfirmasi, menerima suap dan melakukan plagiat.

Potret perkembangan pers di DKI Jakarta sampai tahun 2019 menunjukkan masih banyak riak menerpa wartawan. Kehadiran Undang Undang Pers No.40 tahun 1999 telah mendorong siapa pun bisa mendirikan perusahaan pers. Di sisi lain, berkat perkembangan dan kemajuan teknologi digital, media siber tumbuh menjamur hingga mencapai 43 ribu. Namun belum semuanya memenuhi standar perusahaan pers sesuai dengan peraturan Dewan Pers. Tidak heran muncul fenomena pers “abal-abal” dengan wartawan yang tidak memiliki keterampilan jurnalistik memadai.

Konsekwensinya, kasus pelanggaran kode etik jurnalistik di berbagai daerah termasuk di Ibukota terus terjadi dari tahun ke tahun. Pada sisi lain, ketergantungan media terhadap penerimaan dari iklan masih sangat kuat. Iklan merupakan sumber utama pendapatan media yang berorientasi mencari keuntungan (*profit oriented*) agar bisa melanggengkan operasional perusahaan.

Kasus lain yang masih muncul sampai sekarang antara lain, masih adanya wartawan menerima suap, adanya intervensi pemilik media, perilaku wartawan melakukan kloning berita, menyiarkan berita tanpa konfirmasi, dan menerbitkan berita sensasional. Pada portal media berbasis internet, dominasi kasus yang terjadi umumnya adalah persoalan akurasi berita, serta kualitas dan kredibilitas informasi yang disiarkan. Atas nama kecepatan, *pageview*, dan pertumbuhan bisnis, sejumlah media *online* terjerembab menyiarkan informasi yang belum diverifikasi.

Dengan *tagline* berita terkini, tercepat, setiap detik ada berita, *deadline every second* dan tugas wartawan yang harus membuat minimal 20 berita per hari, banyak berita *online* kemudian disajikan sepotong-sepotong dan belum lengkap, karena verifikasinya belakangan (Maryadi, 2013).

Media juga terperangkap dalam komersialisasi konten karena sangat bergantung pada pemasukan iklan sehingga *homepage* pun penuh iklan. Seorang kepala Humas sebuah kedutaan di Jakarta menilai banyak wartawan “malas”, seperti memuat *press release* tanpa menyebut sumber dan tidak ada pengembangan berita. Atau hanya meminta data dari teman wartawan lainnya karena malas pergi ke tempat kejadian. Paling sering lagi wartawan datang ke tempat acara, tapi tidak ada berita liputannya. Lebih memprihatinkan, media dan wartawan di Jakarta seolah-olah hidup di bawah bayang-bayang pemilik modal yang juga pengurus partai politik (Ritonga, et.al, 2019).

Meski begitu, Ketua Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) Abdul Manan mengingatkan, pembahasan kualitas jurnalistik tidak bisa digeneralisir karena media-media *mainstream* masih menjaga mutu pemberitaan. Persoalannya, sejauh mana penerimaan publik terhadap media, dan apakah kontennya sudah sesuai dengan kepentingan publik?

Di sinilah pentingnya penelitian ini dilakukan untuk mengukur kualitas jurnalistik di Jakarta, terutama wartawan UKW Muda karena mereka bertugas di lapangan. Lokus penelitian di Jakarta karena Jakarta merupakan barometer media dengan skor IKP cukup rendah. Berdasarkan uraian di atas dapat diajukan rumusan masalah penelitian sebagai berikut: “seberapa jauh kualitas jurnalistik pada wartawan UKW Muda di DKI Jakarta?”

Wartawan UKW Muda secara umum adalah para reporter yang bertugas mencari berita di lapangan. Tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan tingkat kualitas jurnalistik wartawan UKW Muda di Jakarta berdasarkan penilaian atau pengalaman kesadaran para redaktur, narasumber dan Humas di DKI Jakarta yang kesehariannya berhubungan dengan wartawan UKW Muda. Tujuan lainnya untuk mengetahui peluang dan hambatan wartawan UKW Muda dalam menjalankan tugasnya.

KERANGKA TEORI

Wartawan merupakan sebutan profesi bagi mereka yang melakukan pekerjaan jurnalistik (Ritonga, et.al, 2017) dan terhimpun dalam suatu organisasi profesi sesuai ketentuan Pasal 5 ayat 1 UU No. 40 tahun 1999. Salah satu alasan jurnalis membentuk organisasi profesi seperti diungkapkan David Hill (dalam Hendratmoko, 1999: 14) adalah untuk memperjuangkan hak dan kepentingan wartawan dalam negosiasi dengan pemerintah maupun pemilik modal.

Untuk memahami peta terkait kompetensi wartawan, diajukan enam penelitian sebelumnya. *Pertama*, Rani Dwi Lestari (2017) dengan judul *Quality News dan Popular News sebagai Tren Pemberitaan Online*, menggunakan enam kriteria untuk menunjukkan berita berkualitas, yakni: pilihan isu, kedalaman substansi, kualitas data atau narasumber, kelengkapan, efek pada publik dan diksi. Media sebagai industri tentu harus *profit oriented* dengan tetap menjaga fungsi sosial media massa. Oleh sebab itu, berita populer atau berita hiburan dapat dikemas menjadi berita berkualitas. Hasil penelitiannya menunjukkan, meski masyarakat lebih menyukai berita populer, namun media dapat menyajikan berita berkualitas dengan gaya populer dengan tetap menjaga kualitas berita.

Kedua, Ellya Pratiwi (2020) dengan penelitian berjudul *Performa Jurnalisme Online dan Kecenderungan Politainment* dalam Berita Pilpres 2019, mengungkapkan berita berkualitas kategori baik masih mendominasi berita Pilpres 2019 di detik.com dan tribunnews.com, meski ada juga praktik politainment di dalamnya. Penelitian Pratiwi menggunakan delapan unit analisis untuk mengukur kualitas jurnalistik yakni relevansi sosial, kedalaman informasi, keterpercayaan, keberagaman, kelengkapan dan sumber berita langsung dalam liputan, jenis narasumber dan gaya bahasa jurnalistik. Hasil penelitiannya menunjukkan, detik.com dan tribunnews.com masih mengedepankan berita berkualitas meski ada juga berita *politainment* untuk menarik khalayak.

Ketiga, Artini (2017) dalam penelitian berjudul *Profesionalisme dan Kualitas Jurnalistik pada Wartawan LKBN Antara*, menunjukkan tidak ada faktor dominan dalam profesionalisme yang mempengaruhi kualitas jurnalistik karena semua faktor saling terkait. Ada delapan faktor yakni komitmen, standar etika, sensor diri, kemampuan lapangan, budaya ruang redaksi, kondisi kerja, kesadaran berbahasa, persepsi peran saling terkait dan secara bersama-sama mempengaruhi kualitas berita di LKBN Antara.

Keempat, hasil penelitian Universitas Multimedia Nasional (UMN) bekerja sama dengan Dewan Pers tahun 2016 dengan judul *Persepsi Media terhadap Perkembangan Teknologi Digital*. Temuannya, berkat kemajuan teknologi, media siber paling diuntungkan dalam kebebasan mencari dan membuat berita. Namun sayangnya, di balik kemudahan teknologi itu justru sering terjadi kloning berita. Juga tidak semua media siber didukung kecukupan modal dan tenaga kompeten di bidang jurnalistik, sehingga muncul media siber di bawah standar.

Kelima, ada empat varian profesionalisme wartawan yakni otonomi, komitmen, keahlian dan tanggung jawab (Wibawa, 2012). Penelitian Wibawa dengan judul *Meraih Profesionalisme Wartawan* menunjukkan, wartawan sulit menegakkan profesionalisme karena kebijakan atasan, hubungan dengan narasumber, serta kebutuhan keluarga, pertimbangan pribadi atau hati nurani, dan teman sejawat yang ingin berbagi berita.

Keenam, ukuran kualitas jurnalistik juga dapat dilihat pada sejauh mana kepatuhan wartawan terhadap Kode Etik Jurnalistik. Hasil penelitian berjudul *Sikap Jurnalis terhadap Kode Etik Jurnalistik* (Artini, et.al, 2018) menunjukkan, pada hakikatnya sebagian besar wartawan sudah memahami arti dan makna Kode Etik Jurnalistik sebagai pegangan profesi, namun masih ada sebagian yang belum paham, bahkan tidak tahu isi kode etik tersebut.

Dari enam penelitian tersebut, dapat diringkas sebuah pemahaman bahwa media dan wartawan masih belum sepenuhnya menunjukkan komitmen profesional dengan menyajikan berita berkualitas sebagai bentuk kewajiban dan tanggung jawabnya bagi kepentingan publik sesuai dengan fungsi sosial media massa.

Kualitas Jurnalistik

Kualitas jurnalistik sampai sekarang masih menjadi isu panjang karena setiap individu mempunyai penilaian sendiri sesuai dengan pengalamannya terhadap kualitas media. Sebagai industri, mau tidak mau media harus *profit oriented* dalam koridor fungsi sosial media massa. Oleh sebab itu, konsep berita berkualitas tidak hanya layak siar dengan memenuhi kaidah jurnalistik, tetapi

juga berita itu harus laku dijual. Dengan demikian, wartawan dihadapkan pada kepentingan media dan kepentingan publik. Faktor kualitas jurnalistik sampai sekarang dengan sendirinya masih menjadi isu penting dalam masyarakat pers.

McQuail (2006) menyatakan, salah satu kriteria penting untuk menguji kualitas media adalah sejauh mana objektivitas dan kualitas informasi yang disampaikan media sesuai fungsi sosial media massa, yakni kepentingan publik. Objektivitas adalah upaya untuk menjaga kredibilitas media yang terdiri dari dua kriteria yakni kefaktualan dan imparsialitas. Kefaktualan mencakup unsur kebenaran dan relevansi, sedangkan imparsialitas terdiri dari keseimbangan dan netralitas yang semuanya ditujukan untuk dapat menjaga kualitas informasi.

Lacy & Rosenstiel (2005) mengajukan enam kriteria kualitas jurnalistik yakni, kualitas presentasi (*presentation quality*), kepercayaan (*trustworthiness*), keberagaman (*diversity*), kedalaman dan keluasan informasi (*depth and breadth information*), kelengkapan (*comprehensive*), urusan publik (*public affairs*), dan relevansi geografis (*geographic relevance*). Semakin tinggi nilai produksi media yang dapat diakses orang banyak, semakin beragam sumber dan pilihan isu dan semakin dalam serta semakin akurat penyajiannya serta semakin dapat dipercaya publik, maka semakin tinggi tingkat kualitas jurnalistik. Semakin tinggi kepedulian media terhadap kepentingan publik, maka kualitas jurnalistik semakin tinggi. Dalam konteks ini kualitas jurnalistik bergantung pada kualitas informasi yang diberikan kepada khalayak luas sesuai dengan tujuan dan fungsi media massa.

Picard (2000) mengatakan, untuk mengukur kualitas jurnalistik tidak bisa hanya dengan melihat hasil karya wartawan, tapi juga juga harus memperhatikan: (1) *mental activity of journalist* yang dapat menghasilkan berita atau *feature*, serta kemampuan wartawan dalam proses seleksi atau sensor diri secara intelektual ketika dia dihadapkan pada pilihan untuk memilih, karena tidak semua peristiwa layak diberitakan. Ukurannya adalah kepekaan, kritis terhadap fakta; (2) *information gathering*, yakni proses bagaimana wartawan mencari dan mengumpulkan informasi dengan cara berpikir kontekstual, kompetensi di lapangan serta nilai-nilai wartawan itu sendiri untuk menjadikan berbagai peristiwa menjadi tulisan jurnalistik.

Weaver (2012) menguatkannya dengan mengatakan kualitas jurnalistik sangat bergantung pada karakteristik wartawan, latarbelakang pendidikan, sikap personal serta makna profesionalisme dan persepsi peran. Mcleod dan Hawley (1984) dalam Jeffres (2002) mengembangkan instrumen untuk mengukur kualitas jurnalistik yakni *ethical standard*: memiliki kebebasan dalam pekerjaan, lebih berpendidikan, lebih kritis, tidak tertarik untuk pindah ke lain pekerjaan di luar jurnalistik dan kurang berambisi dalam masalah uang dan prestise. Selain itu, kepekaan, kritis terhadap fakta, berfikir kontekstual, kompetensi di lapangan serta memiliki sikap atau nilai-nilai moral.

Kompetensi di lapangan ini dikuatkan Kovach (2001). Kemampuan wartawan dalam praktik liputan atau kegiatan jurnalistik secara profesional mencakup sembilan elemen: kewajiban mencari kebenaran, loyalitas pada warga negara, disiplin verifikasi, independensi dari objek liputannya, menjadi pemantau independen dari kekuasaan, memberi forum bagi publik untuk kritik, berusaha membuat hal penting menjadi menarik dan relevan, membuat berita komprehensif dan proporsional, serta mendengarkan hati nurani personalnya.

Wartawan dengan latar belakang pendidikan tinggi dapat mempengaruhi cara pandang wartawan terhadap suatu masalah serta memiliki potensi besar untuk memikirkan efek dari apa yang boleh dan yang tidak boleh dilaporkan di media. Di sinilah diperlukan kepekaan jurnalis dalam melihat peristiwa.

Dari uraian di atas dapat diringkas bahwa kualitas jurnalistik pada hakikatnya bukan sekadar ukuran, karena kerja jurnalistik senantiasa membawa jurnalis pada pergulatan untuk melihat fakta bukan sekadar fakta, detail peristiwa bukan sekadar cerita, dan menulis bukan sekadar persoalan teknis semata. Untuk penelitian ini, semua hasil penelitian sebelumnya dan konsep pada pakar akan menjadi dasar penentuan dimensi kualitas jurnalistik wartawan UKW Muda di DKI Jakarta.

Profesionalisme Wartawan

McQuail (2005) mengajukan konsep *professionalisme* yakni hak dan kewajiban serta tanggungjawab wartawan atau perilaku yang diharapkan dari seorang wartawan terhadap masyarakat, kepentingan umum dan organisasi media dengan mematuhi kode etik dan penegakan peraturan. Profesionalisme adalah standar prestasi tinggi dengan *self censorship* dan komitmen kuat terhadap profesi jurnalistik tentang keinformasian, kebenaran, ketepatan, objektivitas dan keseimbangan, bersifat pluralis dan keberagaman dari berbagai sudut pandang untuk menjawab masalah.

Altschull (dalam McQuail, 2006) sudah lama mensinyalir keadaan pers di berbagai negara dengan mengemukakan tujuh prinsip jurnalisme yang berlaku dengan sistem pers apa pun. *Pertama*, praktik pers selalu berbeda dengan teori pers. *Kedua*, media massa bukanlah pelaku yang independen meski mereka memiliki potensi untuk menjalankan kekuasaan yang independen karena dalam sistem pers mana pun media berita merupakan agen para pemegang kekuatan politik dan ekonomi. *Ketiga*, isi media selalu mencerminkan kepentingan pemberi dana. *Keempat*, semua sistem pers menganut paham kebebasan, namun praktiknya bervariasi. *Kelima*, semua sistem pers menyatakan melayani kepentingan masyarakat. *Keenam*, setiap model pers memandang model pers lainnya sebagai pers yang menyimpang. *Ketujuh*, sekolah jurnalistik sulit melepaskan diri dari kontrol penguasa.

Lamberth (2001) mengaitkan profesionalisme wartawan sebagai bentuk *committed journalist*, dengan enam kriteria untuk mendefinisikan komitmen wartawan profesional yaitu: bekerja sebagai wartawan penuh waktu, memiliki komitmen pada profesi, standar profesi yang ditentukan organisasi formal, memiliki pengetahuan atau jenjang pendidikan formal, melayani publik serta memiliki kebebasan.

Perry (2007) mengajukan konsep *self-censorship* sebagai ukuran profesionalisme wartawan yakni bentuk kemampuan wartawan dalam proses seleksi atau sensor diri secara intelektual ketika dia dihadapkan pada pilihan semua pihak secara positif karena tidak semua peristiwa layak diberitakan. Ukurannya adalah kepekaan, kritis terhadap fakta, berfikir kontekstual, kompetensi di lapangan serta nilai-nilai wartawan itu sendiri.

Dewan Pers (2010) menetapkan tiga standar kompetensi kunci yang harus melekat pada wartawan yakni: (1) kesadaran (*awareness*) tentang etika dan hukum, kepekaan jurnalistik serta pentingnya jejaring dan hobi; (2) Pengetahuan (*knowledge*), mencakup teori dan prinsip jurnalistik, pengetahuan umum dan pengetahuan khusus; (3) keterampilan (*skills*), mencakup kegiatan 6 M (mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi), serta melakukan riset/investigasi, analisis/prediksi, serta menggunakan alat dan teknologi informasi.

Dengan mengetengahkan berbagai teori, maka penelitian ini menentukan definisi konsepnya yakni kualitas jurnalistik adalah penampilan produk jurnalistik dari media dan wartawan dalam menyampaikan informasi berkualitas melalui pemberitaan yang layak siar, memenuhi kaidah jurnalistik serta laku dijual dengan penampilan media dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan atau urusan publik sesuai fungsi sosial media massa.

Adapun definisi operasionalnya adalah sejauh mana media melalui pemberitaannya dapat memenuhi tiga dimensi kualitas jurnalistik: kesadaran (s), pengetahuan (p) dan ketrampilan (k) yang terdiri dari 12 indikator yakni standar etika, kepekaan jurnalistik kesadaran berbahasa, disiplin validasi berita, objektivitas, relevansi sosial, kedalaman informasi, keberagaman, keterpercayaan, kelengkapan, kepentingan publik, persepsi peran sebagai mana diuraikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Definisi Operasional

Berita berkualitas	Definisi operasional	Skala	Sumber
1. Standar Etika (S)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejauh mana kepatuhan wartawan terhadap kode etik dalam pemberitaan dan tugas di lapangan 2. Sejauh mana kesadaran wartawan untuk tidak melakukan pelanggaran kode etik seperti plagiat dan kloning berita 3. Sejauh mana wartawan menjaga hubungan dengan narasumber 4. Sejauh mana wartawan memahami persepsi peran sebagai wartawan 	Likert	McQuail (2005) Perry (2007) Artini (2017)
2. Kepekaan jurnalistik (S)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejauh mana wartawan melakukan sensor mandiri terhadap suatu isu penting 2. Sejauh mana komitmen wartawan dalam menentukan sikap antara kepentingan publik dan kepentingan perusahaan media dalam suatu isu publik 	Likert	Picard2000) Lamberth (2001)

	3. Sejauh mana tingkat kritis wartawan terhadap isu yang boleh dan tidak boleh disiarkan		
3. Kesadaran berbahasa (S)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejauh mana wartawan memahami pilihan kata dan kalimat yang dapat mempengaruhi publik dalam penulisan berita 2. Sejauh mana wartawan menjaga kesantunan berbahasa dengan diksi yang tidak menyakiti publik 3. Sejauh mana wartawan dapat mengolah berita penting menjadi menarik dan relevan dengan kalimat khas 4. Sejauh mana gaya bahasa pada judul atau <i>lead</i> berita sesuai kaidah jurnalistik 	Likert	Wibowo (2009) Pratiwi (2020) Lestari (2017) Artini (2017) Littlejohn (2006) Kovach (2001)
4. Disiplin validasi berita (p)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejauh mana wartawan melakukan validasi berita: riset, observasi dan verifikasi 2. Sejauh mana wartawan memahami tugasnya untuk mencari kebenaran suatu peristiwa berdasarkan evidensi. 	Likert	Kovach (2001)
5. Kedalaman informasi (k)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejauh mana wartawan membuat berita secara komprehensif dengan penggalian informasi seperti melakukan investigasi atau wawancara eksklusif 2. Sejauh mana pemberitaan berkelanjutan (<i>continuing news</i>) agar publik mendapat informasi lebih dalam 	Likert	Pratiwi (2020) Lestari (2017)
6. Kelengkapan (k)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejauh mana wartawan dapat menyajikan berita yang memenuhi kaidah jurnalistik (5wdan1H) dan nilai berita 2. Sejauh mana wartawan menyajikan data pendukung seperti statistik atau foto, sehingga berita semakin jelas 3. Sejauh mana wartawan menyajikan peristiwa bukan sekedar peristiwa, tapi ada unsur <i>so what</i> yang dapat mendorong peran masyarakat 	Likert	Pratiwi (2020) Lestari (2017) Lacy & Rosenstiel (2005)
7. Objektivitas (p)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejauh mana wartawan menjaga kepercayaan publik terhadap berita yang disajikan 2. Sejauh mana pemberitaan secara faktual tanpa dibumbui komentar atau opini wartawan 3. Sejauh mana dapat menjaga keseimbangan atau netralitas dalam pemberitaan 	Likert	Mc Quail (2005) Lacy & Rosenstiel (2005)
8. Kualitas data (p)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejauh mana wartawan menjaga akurasi dan keberimbangan dalam berita 2. Sejauh mana wartawan mampu menyajikan peristiwa dengan jumlah informasi yang cukup 3. Sejauh mana wartawan memilih sumber beritakredibel untuk mendapat data berkualitas 	Likert	McQuail (2005) Lestari (2017)
9. Keberagaman (k)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejauh mana wartawan mampu menyajikan peristiwa dengan berbagai sudut pandang dari berbagai sumber 2. Sejauh mana pemberitaan menyajikan topik-topik pendukung agar lebih jelas 3. Sejauhmana pemberitaan menyajikan bentuk tulisan lainnya selain <i>straight news</i>, seperti <i>features</i>, <i>indepth news</i> atau <i>analysis news</i> 	Likert	Lacy & Rosenstiel (2005) Pratiwi (2020)

10.Relevansi sosial (p)	1. Sejauh mana pemberitaan menyangkut isu publik atau isu personal 2. Sejauh mana keseimbangan suara narasumber dalam pemberitaan antara masyarakat atau pejabat /personal	Likert	Pratiwi (2020)
11.Kepentingan publik (p)	1. Sejauh mana wartawan memahami efek pemberitaan pada publik 2. Sejauh mana perhatian pada kelompok rentan, kepentingan anak2 dan perempuan dalam berita	likert	McQuail (2005) Pratiwi (2020) Lestari (2017)
12.Persepsi peran (s)	1. Sejauh mana wartawan menyadari peran profesinya sebagai wartawan 2. Sejauh mana wartawan terdorong untuk meraih prestasi tinggi dalam tugasnya 3. Sejauh mana wartawan menguasai teknologi untuk kemudahan pekerjaannya	likert	Lamberth (2001) Artini (2017)

(Sumber olahan peneliti dari berbagai sumber)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan *mixmethod* (Cresswell, 2014) yakni menggabungkan survei deskriptif dan *indepth interview* untuk mendapatkan gambaran mendalam mengenai kualitas jurnalistik wartawan UKW Muda di DKI Jakarta. Metode survei dilakukan dengan menggunakan kuesioner untuk memperoleh gambaran mengenai kualitas jurnalistik wartawan UKW Muda di DKI Jakarta. Lalu dilanjutkan dengan *indepth interview* dengan Ketua Umum Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Abdul Manan dan Ketua Umum Dewan Pers periode 2013 – 2019 Yoseph Adi Prasetyo.

Lokasi penelitian ini di Jakarta yang merupakan barometer industri media dengan jumlah perusahaan media terbanyak di Indonesia (Media Landscape, 2019). Populasi adalah para *stake holder* yang memiliki pengalaman kesadaran terlibat langsung dengan wartawan UKW Muda yakni redaktur, Humas dan narasumber yang sering berurusan dengan wartawan muda. Jumlah populasi tidak diketahui karena jumlah media terdiri dari 422 cetak dan elektronik dan sekitar 43.00 media siber, ditambah Humas dan narasumber. Oleh sebab itu dilakukan *teknik sampling acak sederhana* sebanyak 100 orang redaktur, humas dan narasumber di DKI Jakarta.

Teknik analisis data yakni memakai analisis *mean score* untuk mengukur tingkat kualitas jurnalistik, dengan skala pengukuran Likert. Adapun kategorinya sebagai berikut: 0-30 buruk sekali, 31-55 kurang baik, 56-69 agak baik, 70-89 cukup baik, 90 -100 baik sekali. Hasil kuesioner diinterpretasi berdasarkan data sekunder dan hasil wawancara. Penelitian ini dilakukan saat pandemi COVID-19 sehingga sulit menemui dan mendapatkan responden se DKI Jakarta. Penelitian dilakukan di Jakarta, sehingga belum mewakili populasi secara nasional.

HASIL PENELITIAN

Terdapat 422 perusahaan pers di Jakarta dengan jumlah wartawan sebanyak 4.000 orang yang belum seluruhnya mengantongi sertifikat UKW Muda. Sejumlah kasus yang menerpa wartawan di Jakarta, antara lain pelanggaran kode etik jurnalistik, menerbitkan berita tanpa konfirmasi dan lebih suka melakukan *copy paste* berita sesama teman. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan apakah wartawan bersertifikat kompetensi UKW Muda sudah menjalankan fungsinya secara profesional? Yang paling tepat menjawabnya adalah perusahaan tempat wartawan itu bekerja, narasumber dan tokoh masyarakat dan para Humas.

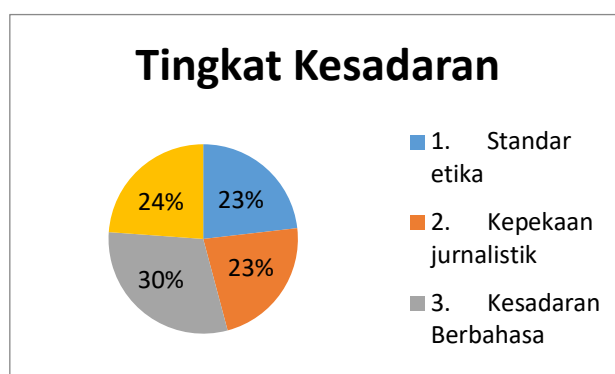
Dalam wawancara khusus, sejumlah wartawan UKW Muda mengaku ikut UKW sebagai bentuk kewajiban, dan belum ada kebanggaan dibalik sertifikat UKW. Sertifikat UKW belum dapat dipakai untuk menambah kesejahteraan di perusahaan atau naik jenjang jabatan di ruang redaksi. Ada kalanya narasumber menanyakan sertifikat UKW. Menurut beberapa wartawan, materi UKW tidaklah istimewa karena hanya menyangkut kegiatan wartawan sehari-hari di lapangan, seperti wawancara atau ikut jumpa pers. Ada sembilan kelompok mata uji dalam UKW Muda, dan mereka dinyatakan lulus dengan nilai minimal 70. Permasalahannya, sejak tahun 2010 belum pernah dilakukan evaluasi terhadap kualitas jurnalistik para pemegang sertifikat UKW.

Penelitian ini menjadi penting dengan merujuk pada rendahnya IKP provinsi DKI Jakarta, di samping masih banyak pengaduan masyarakat ke Dewan Pers yang sebagian besar mengadukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, tidak melakukan konfirmasi dan plagiat. Dengan demikian, survei kualitas jurnalistik wartawan UKW Muda signifikan dilakukan berbagai program untuk peningkatan mutu wartawan.

Analisis Hasil Kuesioner

Sesuai dengan definisi operasional, terdapat tiga *variable* utama yakni kesadaran, pengetahuan dan ketrampilan dengan 12 indikator dan 48 subindikator yang kemudian diukur dengan skala Likert. Nilai pengukuran sebagai berikut: 90-100 kategori sangat baik, 70-89 kategori baik, 56-69 kategori sedang, 31-55 kategori buruk, 1-30 kategori sangat buruk

Tingkat Kesadaran (Gambar 1) untuk mengukur standar etika, kepekaan jurnalistik, kesadaran berbahasa dan persepsi peran. Nilai rata-rata mencapai: 75.34 yang berarti kategori baik. Pada tataran kesadaran terdiri dari standar etika dengan skor 75.67, kepekaan jurnalistik dengan nilai 74, kesadaran bahasa dengan nilai 74.20 dan persepsi peran dengan nilai 77.87. Gambaran nilai rata-rata menunjukkan tingkat kesadaran wartawan UKW Muda masuk pada kategori baik.



Gambar 1. Tingkat Kesadaran Wartawan

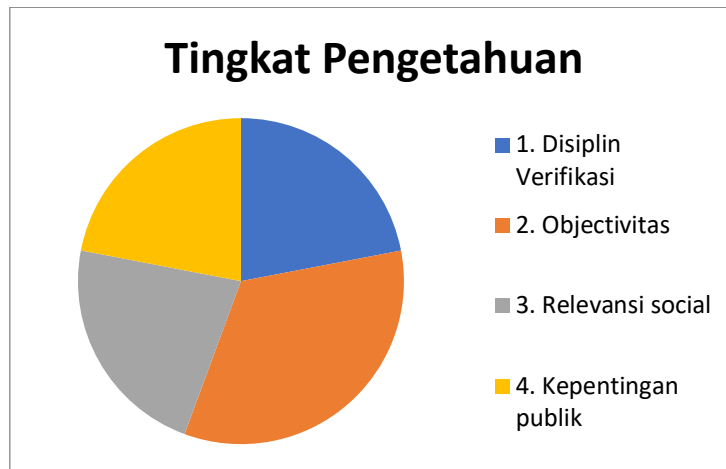
Gambar 1 menunjukkan sebagian besar responden menilai kesadaran berbahasa pada wartawan UKW cukup tinggi. Kesadaran berbahasa tampak pada pilihan kata dan kalimat yang dapat mempengaruhi publik. Kebanyakan wartawan muda mengambil pola arus utama. Namun, terdapat kecenderungan wartawan muda tidak begitu peduli dengan gramatika bahasa. Wartawan UKW Muda juga menjaga kesantunan berbahasa dengan diksi yang tidak menyakiti publik. Pada kriteria ini, wartawan muda mendapat tuntutan dari redaksi agar beritanya sebisa mungkin viral atau *ngetop* sehingga mereka akhirnya agak kurang memperhatikan kebahasaan.

Dari sisi mengolah berita penting menjadi lebih menarik dan relevan, wartawan UKW Muda dinilai lebih baik dibandingkan wartawan muda zaman dulu. Suasana persaingan antarmedia begitu kompleks sehingga wartawan muda tertantang untuk menampilkan hal yang lebih menarik agar dibaca orang banyak. Ini tampak pada pilihan gaya bahasa pada judul dan *lead* sesuai dengan kaidah jurnalistik. Para redaktur juga menilai wartawan muda zaman sekarang lebih pintar membuat judul, namun untuk *lead* cenderung buruk.

Untuk sisi persepsi peran, responden menilai rata-rata 80 yang berarti masuk kategori baik dan menandakan wartawan muda bangga terhadap profesinya. Hal ini karena bertugas di lapangan, berkumpul dengan teman-teman seprofesi, merasa eksklusif dan bisa mendekati pejabat atau pengusaha top. Namun hal ini ada efeknya, yaitu wartawan muda tidak bisa *single fighter*. Kondisi ini menyebabkan banyak wartawan muda menjadi sombong. Pada kriteria ini, responden rata-rata memberikan poin 75, ini berarti karena sistem kerja wartawan muda yang bersifat bergerombol di lapangan, yang tentu membawa efek negatif, sehingga *output* personal cenderung buruk.

Tingkat Pengetahuan. Gambar 2 menunjukkan tingkat pengetahuan, untuk mengukur standar disiplin verifikasi, objektivitas, relevansi sosial dan kepentingan publik. Nilai rata-rata mencapai 73.52 yang berarti masuk kategori baik. Tataran ini terdiri dari standar disiplin verifikasi dengan skor 72.76, objektivitas dengan nilai 74.17, relevansi sosial dengan nilai 74.11 dan kepentingan publik dengan nilai

72.72. Dari gambaran nilai rata-rata menunjukkan tingkat pengetahuan wartawan UKW Muda masuk kategori baik.



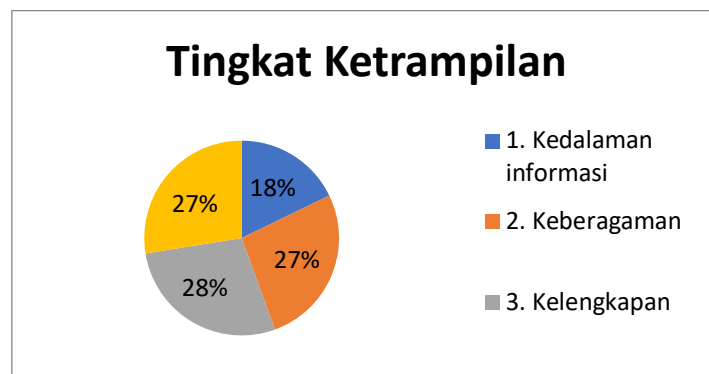
Gambar 2. Tingkat Pengetahuan Wartawan

Gambar 2 menunjukkan sebagian besar responden menilai objektivitas pada wartawan UKW muda cukup tinggi, dengan nilai rata-rata 74,17, berarti baik, Ini menunjukkan wartawan muda atau reporter lebih jujur serta penulisan selalu didasarkan pada fakta atau informasi yang mereka dapatkan. Hasilnya publik cenderung mempercayai informasi sepanjang selaras dengan pendapat/opini masyarakat sendiri dan lebih dipercaya daripada sosial media. Wartawan muda sudah cukup baik untuk memenuhi syarat berita yang baik dan benar yaitu berita berimbang, suatu yang sudah menjadi tuntutan dari kantor redaksi.

Untuk sisi relevansi sosial, responden menilai rata-rata 74.11, berarti masuk kategori baik. Wartawan muda sudah mengedepankan keseimbangan masyarakat karena masyarakat sebagai sumber utama dari pemberitaan dan menjalani kehidupan sehari-hari. Namun bagi media penyiaran, terutama kelompok reporter televisi atau radio masih membutuhkan *sound bite* referensi kutipan, dan biasanya diberikan oleh tokoh yang dipercaya oleh masyarakat, yakni orang yang diakui masyarakat sebagai narasumber, bukan masyarakat biasa.

Peran redaktur juga diberikan nilai positif karena redaktur bisa mengedepankan isu-isu publik. Namun masih ada kelemahan yang dilakukan oleh wartawan muda. Mereka lebih banyak mengutip suara masyarakat daripada pejabat berwenang. Akibatnya sumber yang dikutip tidak memahami permasalahan, sehingga terkesan masyarakat umum dikutip sekadar sebagai pelengkap untuk menguatkan kesimpulan wartawan muda saja.

Tingkat Ketrampilan. Gambar 3 adalah tingkat keterampilan untuk mengukur standar kedalaman informasi, keberagaman, kelengkapan dan kualitas data. Nilai rata-rata mencapai: 73.90 berarti masuk kategori baik. Tataran ini terdiri dari standar kedalaman informasi dengan skor 72.42, keberagaman dengan nilai 72.16, kelengkapan dengan nilai 75.90 dan kualitas data dengan nilai 74.64. Gambaran nilai rata-rata menunjukkan tingkat kesadaran wartawan UKW Muda masuk kategori baik.



Gambar 3. Tingkat Keterampilan wartawan

Gambar 3 menunjukkan sebagian besar responden menilai kelengkapan pada wartawan UKW cukup tinggi. Responden menilai rata-rata 75,90 yang berarti masuk dalam kategori baik. Ini menunjukkan wartawan muda umumnya telah dibekali dengan pengetahuan 5W 1H namun kembali ke jenis media tempatnya bekerja, seperti media *online*, kelengkapan 5W 1H dapat dijadikan beberapa naskah. Foto atau kelengkapan data para wartawan menjadi gambaran keberadaan di lokasi atau kegigihan mereka dalam memberitakan sebuah isu sebelum ditugaskan ke lapangan, wartawan muda akan mendapatkan pelatihan terlebih dahulu oleh redaktur ataupun senior dalam pengemasan sebuah *angle* peristiwa maupun isu.

Untuk sisi kualitas data, responden menilai rata-rata 74.64 yang berarti masuk kategori baik. Hal ini menunjukkan wartawan seringkali berpegang pada narasumber yang mudah ditemui atau dihubungi karena tenggat waktu yang ketat. Hal ini berpengaruh terhadap kedalaman dan kekayaan informasi yang didapat jika wartawan melakukan beberapa pendekatan tambahan kepada narasumber kredibel lainnya. Selain itu wartawan muda juga cenderung menggunakan narasumber yang direkomendasikan oleh teman ataupun editornya dibandingkan dengan mencari dan melihat kredibilitas yang sesungguhnya.

Hasil rata-rata analisis kuesioner. Nilai dari tingkat kesadaran adalah 75.34, pengetahuan 73.52, ketrampilan 73.90 sehingga nilai rata-rata keseluruhan dari ketiga kriteria itu adalah 74.36. Ini menunjukkan tingkat kesadaran, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh wartawan muda masuk dalam kategori baik. Walaupun masuk dalam kategori baik, namun hal ini belum menunjukkan kualitas wartawan muda yang baik atau profesional. Masih ada beberapa hal yang menjadi catatan dan koreksi dari responden terhadap kualitas wartawan muda. Rata-rata per indikator (Tabel 2) sebagai berikut:

Tabel 2. Rata-rata Per Indikator

Indikator	Nilai rata-rata
Standar etika	75.67 / masuk kategori baik/peringkat 3
Kepekaan jurnalistik	74.00 / masuk kategori baik
Kesadaran berbahasa	74.20 / masuk kategori baik
Persepsi peran	77.87 / masuk kategori baik/peringkat 1
Disiplin Verifikasi	72.76 / masuk kategori baik
Objektivitas	74.17 / masuk kategori baik
Relevansi Sosial	74.11 / masuk kategori baik
Kepentingan Publik	72.72 / masuk kategori baik
Kedalaman Informasi	72.42 / masuk kategori baik
Keberagamaan	72.16 / masuk kategori baik
Kelengkapan	75.90 / masuk kategori baik/peringkat 2
Kualitas Data	74.64 / masuk kategori baik
Rata-rata	74.36 / kategori baik

Tabel 2 menunjukkan, kualitas jurnalistik wartawan UKW Muda di DKI Jakarta berdasarkan penilaian para redaktur, humas dan narasumber, menunjukkan skor 74.36 yang berarti masuk kategori baik. Ini dapat dimaknai atau diinterpretasikan bahwa kualitas jurnalistik wartawan UKW Muda di Jakarta masuk kategori baik.

Meski perolehan nilai masuk kategori baik bagi wartawan UKW Muda di DKI Jakarta, namun angka tersebut menunjukkan wartawan muda masih belum profesional. Rentang angka masih 70-an, yang berarti masih jauh di bawah angka 100, berarti juga untuk menjadi wartawan profesional dengan nilai 100 masih sangat jauh. Kondisi ini menuntut wartawan harus berusaha keras untuk melakukan hal terbaik sebagai wartawan profesional.

Temuan *survey* tersebut hampir sama dengan perolehan skor Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2020 untuk provinsi DKI Jakarta yakni sebesar 72.63, urutan ketiga dari bawah di antara 34 provinsi. Kondisi ini bisa dipahami karena *survey* IKP 2020 dan *survey* kualitas jurnalistik UKW muda dilakukan saat pandemi Covid-19, sehingga situasi dan kondisi pers ikut terpengaruh.

Abdul Manan, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI), mengatakan, rendahnya perolehan mutu wartawan tidak bisa digeneralisir, karena masih ada wartawan dari media arus utama. Media-media besar selalu menyiapkan wartawannya melalui pelatihan internal. Sampai sekarang belum ada gerakan perubahan yang signifikan untuk meningkatkan kualitas pers, termasuk di Jakarta.

Persoalan yang masih menghadang wartawan di DKI Jakarta, selain tingkat kesejahteraan yang belum memadai, tingkat pendidikan yang belum merata, juga karena posisi perusahaan pers yang sebagian terikat dengan kepentingan partai politik, sehingga banyak wartawan terikat dengan kepentingan media, serta pelanggaran kode etik jurnalistik, ditandai dengan masih adanya wartawan menerima suap.

Temuan *survey* ini menguatkan tujuh prinsip jurnalisisme Altschull (dalam McQuail, 2006) yang sejak lama mensinyalir keadaan pers di semua negara, bahwa dalam sistem pers apa pun praktik pers selalu berbeda dengan teori pers. Di sisi lain, media massa bukanlah pelaku yang independen meski mereka memiliki potensi untuk menjalankan kekuasaan yang independen karena dalam sistem pers mana pun media berita merupakan agen para pemegang kekuatan politik dan ekonomi. Selain itu, isi media selalu mencerminkan kepentingan pemberi dana. Semua sistem pers menganut paham kebebasan, namun praktiknya bervariasi, meski semua sistem pers menyatakan melayani kepentingan masyarakat. Di sisi lain, sekolah-sekolah jurnalistik juga sulit melepaskan diri dari kontrol penguasa.

Diperlukan komitmen wartawan untuk menunjukkan perannya sebagai wartawan profesional melalui hasil karyanya. Di sinilah pentingnya kepekaan jurnalistik dan kesadaran berbahasa agar semua informasi dapat disampaikan secara bertanggung jawab, karena ada hak publik di dalamnya untuk mendapatkan informasi berkualitas. Eksistensi wartawan dan media adalah bagaimana memenuhi kaidah layak siar dan laku dijual. Artinya, wartawan tidak bisa hanya memenuhi rumus baku jurnalistik 5W dan 1 H dalam membuat berita, karena di baliknya ada tuntutan kualitas jurnalistik, artinya berita tersebut dibaca oleh orang sebanyak-banyaknya.

Analisis keabsahan data dan triangulasi. Untuk keabsahan data penelitian digunakan triangulasi sumber dengan wawancara mendalam pada dua tokoh pers nasional sesuai perolehan skor survei. Wawancara dilakukan secara *online* tanggal 29 dan 30 Juni 2020. Dua tokoh pers tersebut adalah Abdul Manan (Ketua Umum AJI) dan Yoseph Adi Prasetyo, Ketua Dewan Pers 2013-2019.

Kedua tokoh pers ini berpendapat UKW seperti dilakukan di ruang hampa. Perusahaan pers tidak memberi apresiasi dan wartawan juga apatis karena hampir tidak ada perubahan dalam karirnya sebagai pemegang sertifikat UKW. Sistem redaksi belum melihat UKW sebagai penambah mutu kualitas wartawan. Bagi wartawan, setelah mengikuti UKW juga tidak mengalami perubahan, baik kesejahteraan maupun peningkatan karir di redaksi. Seharusnya UKW menjadi suatu kesatuan sistem dan menjadi bagian utuh dalam keredaksian.

UKW di satu sisi menjadi cerminan kualitas wartawan, tapi bukan yang utama. Perlu diikuti dengan pelatihan wartawan untuk meningkatkan kapasitas yakni pengetahuan, ketrampilan dan etika. Selain itu, tidak ada minimum *requirement* pendidikan untuk menjadi wartawan. Kondisi ini sudah membuat komplikasi tersendiri. Banyak peristiwa atau kasus pers yang terus berulang, karena tidak ada yang bisa *men-drive* perubahan drastis.

Kedua tokoh pers ini sepakat, masalah kesejahteraan wartawan menjadi elemen penting untuk meningkatkan kualitas pers. Jalan keluarnya adalah memanfaatkan halaman media untuk meraih pendapatan lebih tinggi demi kesejahteraan wartawannya, antara lain menjual rubrik-rubrik tertentu dengan liputan khusus yang memberi manfaat. Selain itu, media harus tetap mempertahankan kredibilitasnya dengan tetap menjaga kepercayaan publik terhadap isi media. Wartawan adalah mahasiswa seumur hidup, dan harus terus menerus belajar dan meningkatkan kompetensi. Wartawan juga harus tetap melakukan verifikasi, konfirmasi, dan klarifikasi dalam menjalankan tugasnya sebagai wartawan profesional.

KESIMPULAN

Tingkat kualitas jurnalistik wartawan UKW Muda di Jakarta berada dalam katagori baik berdasarkan penilaian atau pengalaman kesadaran para redaktur, narasumber dan Humas di DKI Jakarta yang kesehariannya berhubungan dengan wartawan. Hal ini dapat dimaknai bahwa wartawan UKW Muda di DKI Jakarta cukup profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai wartawan meski harus menghadapi banyak tantangan seperti minimnya kesejahteraan dan masih kuatnya kepentingan pemilik media.

Peluang bagi wartawan untuk mengejar kualitas jurnalistik dengan nilai sempurna (100) dalam UKW masih terbuka. Namun, masih ada hambatan wartawan UKW Muda dalam menjalankan tugasnya, yakni kuatnya intervensi kepentingan iklan dalam proses menjalankan kebebasan jurnalisisme. Selain itu sistem kerja wartawan di lapangan yang bergerombol membuat mutu jurnalistik menjadi terabaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Artini. (2017). *Riset Jurnalistik. Mencari Kebenaran Dengan Metodologi*. Jakarta: Spirit Komunikasi
- Artini. (2013). *Potret Media*. Jakarta: RM Books
- Artini. (2018). *Wartawan Bicara Kompetensi dan Profesionalisme*. Jakarta: Semesta Rakyat Merdeka
- Cresswell. J.W. (2014). *Research Design Pendekatan Kualitatif - Kuantitatif dan Mixed*. (Terjemahan). Jakarta: Pustaka Pelajar
- Kovach, B & Rosenstiel, T. (2001). *Elemen-elemen Jurnanisme*. (Terjemahan). Jakarta: Institut Arus Informasi
- Lestari, D.R. (2017). Quality News dan Popular News sebagai Trend Pemberitaan Online. *Channel*. 5(1), 83-94
- Littlejohn, S.W & Karen A.F. (2006). *Human Communication*. USA: Thomson Wadsworth
- Lacy, S & Rosenstiel, T. (2005). *Defining and Measuring Quality Journalism*. Rutgers School of Communication and Information
- McQuail, D. (2005). *Media Performance, Mass Communication and Public Interest*. London: Sage Publication
- McQuail., D (2006) *Teori Komunikasi Massa Suatu pengantar (terjemahan)*. Jakarta: Penerbit Airlangga
- Perry, D.K. (2007). *Theory and Research in Mass Communication Context Consequences*. London: Lawrence Associate Publishers
- Picard, R.G. (2000). Measuring Interpreting Productivity of Journalist, *Newspaper Research Journal*. 19(4), 71-84
- Pratiwi, E. (2020). *Jurnanisme Online dan Kecenderungan Politainment dalam Berita Pilpres 2019*. Diunggah 20 Juni 2020. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jsj>.
- Ritonga, R., Syahputra, I. (2019). Citizen Journalism and Public Participation in the Era of New Media in Indonesia: From Street to Tweet. *Media and Communication*, 7(3), 79-90.
- Ritonga, R., Murwani. E., Ritonga. S. (2017). Gender Awareness of Maria Hartiningsih as Daily Kompas Reporter. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 2(2), 82-91
- Wibawa, D. (2012). Meraih profesionalisme Wartawan. *Jurnal Mimbar*, 28(1),
- Weaver, D.H., Lars, W. (2012). *The Global Journalist in the 21 Century*. New York: Routledge